BAB I

PENDAHULUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi memegang peranan penting dalam sistem ekonomi dan sosial kita. Keputusan-keputusan tepat yang diambil oleh para individu, perusahaan, pemerintah dan kesatuan-kesatuan lain merupakan hal yang esensial bagi distribusi dan penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Untuk mengambil keputusan seperti itu, kelompok-kelompok tersebut harus mempunyai informasi yang dapat diandalkan yang diperoleh dari sistem akuntansi. Lembaga pemerintah berkepentingan dengan kegiatan keuangan yang mengandalkan data akuntansi dalam menilai efisiensi operasi dan untuk menilai kelayakan rancangan perpajakan dan program-program pembelanjaan

Lembaga pemerintahan memang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi akuntansi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga pemerintahan juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, maka pada satu sisi, lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Untuk itu, maka pada sisi yang lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya-biaya tersebut.

Akuntansi untuk Pemerintah Daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklarifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah sebagai suatu entitas, serta penafsiran hasil-hasilnya.

Laporan keuangan pemerintah kota Bandung terdiri atas Laporan Pendapatan dan Belanja / laporan perhitungan APBD, laporan Aliran Kas, dan Neraca termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan.

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah disebutkan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan akuntansi dalam kantor Pemerintah Kota Bandung memerlukan suatu sistem dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan undang-undang serta peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Kebijakan akuntansi diharapkan dapat menyelenggarakan sistem akuntansi yang tepat, lengkap, dan tepat waktu atas transaksi keuangan Pemerintah Daerah serta mampu menyediakan sebuah sistem akuntansi yang dapat menyediakan informasi yang berguna bagi proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi setiap transaksi keuangan Pemerintah Daerah, serta berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial. Selain itu, juga memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh dana, kekayaan dan hutang. Berkaitan dengan permasalahan diatas maka penulis menyusun laporan Kerja Praktek ini dengan judul **TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG.**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan Kerja Praktek bagi Perusahaan

- Sebagai bahan tinjauan dan masukan sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- Sebagai suatu cara ikut serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

Kegunaan Kerja Praktek bagi peserta Kerja Praktek

- Sebagai kajian untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai proses kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
- Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan laporan sebagai salah satu syarat penunjang pelaksanaan kerja praktek.

Kegunaan Kerja Praktek bagi Instansi Pendidikan

- Sebagai suatu alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan
- Hasil Kerja Praktek ini dapat digunakan juga sebagai bahan informasi dan sarana yang diharapkan dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan masukan untuk langkah-langkah penetapan Kerja Praktek lebih lanjut.

1.4 Metode Penulisan Laporan Kerja Praktek

Metode penulisan merupakan tahapan – tahapan dalam melakukan peninjauan, adapun tahapan – tahapan yang penulis lakukan adalah berdasarkan :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mempelajari buku – buku, literature, dokumen – dokumen lainnya serta catatan – catatan yang diterima selama masa perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang penulis kemukakan.

2. Observasi

   Yaitu mengadakan pengamatan dan penelitian langsung di lapangan yang menjadi objek Kerja Praktek dan penelitian.

3. Wawancara

   Yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para pejabat yang bersangkutan serta para pegawai di lingkungan kantor.

4. Dokumentasi

   Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada pada perusahaan.

1.5 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek pada Kantor Pemerintah Kota Bandung di Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan yang beralamat di Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung.

Lama kerja praktek ini selama satu bulan mulai tanggal 21 September 2004 sampai dengan 20 Oktober 2004, dari pukul 09.00 s/d pukul 15.30.